

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memperbaiki stabilitas perekonomian dunia, negara-negara G20 melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh Kepala Negara anggota G20. G20 merupakan kelompok yang terdiri dari sembilan belas negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB). G20 adalah forum ekonomi utama dunia yang mewakili lebih dari setengah penduduk dunia, tiga per empat perdagangan global, dan sebagian besar dari perekonomian dunia. Untuk memperbaiki perekonomian dunia, negara-negara anggota G20 akan melakukan pertemuan guna membahas upaya perbaikan perekonomian dunia dalam KTT. Sistem kerja pengadaan KTT oleh negara-negara G20 adalah adanya presidensi atau yang biasa disebut tuan rumah yang ditetapkan berdasarkan sistem rotasi kawasan dan bergantian setiap periodenya (Sherpa, 2020).

Dalam keanggotaan G20, setiap anggota negara akan diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral negara tersebut. Setiap tahunnya salah satu anggota dari negara yang termasuk dalam G20 akan diberi kesempatan secara bergiliran untuk menjadi ketua G20. Agenda G20 akan dikoordinasikan oleh tiga pihak, yaitu ketua periode sebelumnya, ketua periode sekarang, dan ketua periode mendatang, atau biasa disebut sebagai Troika. Negara-negara yang termasuk dalam G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan

Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Fungsi utama dari G20 adalah sebagai forum diskusi kebijakan terkait stabilitas ekonomi global yang bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai mitra yang setara dan memberi bantuan ekonomi kepada yang membutuhkan (Nailufar, 2020).

Negara Indonesia yang merupakan salah satu anggota G20 turut menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 21 dan 22 November 2020 dengan diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri serta Sekretaris Kabinet. Ketua dari G20 pada tahun ini adalah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang merupakan Kepala Negara Arab Saudi. Pertemuan G20 secara virtual ini memiliki dua agenda utama, yaitu untuk menghadapi pandemi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi, serta membangun masa depan yang tangguh. Saat ini, perekonomian dunia mengalami penurunan sebesar 4,4 persen dan pemulihan secara gradual diperkirakan terjadi pada tahun 2021. Untuk mewujudkan hal ini, kerja sama multilateral dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh (Ramadhani, 2020).

Negara-negara G20 merupakan negara-negara yang mewakili 85 persen *gross domestic product* (GDP) dunia (CNN Indonesia, 2019). GDP adalah salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam peningkatan pendapatan nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara baik, pendapatan atau penerimaan negara akan meningkat karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya penambahan produksi. Pertambahan produksi pada

suatu negara akan meningkatkan penghasilan atau penerimaan warga negara dan hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Kontribusi GDP yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan pula oleh kategori negara tersebut, yaitu apakah negara tersebut termasuk negara terbelakang, negara berkembang, atau negara maju. Indikator yang digunakan untuk menentukan kategori negara adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi suatu perekonomian yang terbagi pada sektor-sektor ekonomi, yaitu struktur agraris atau struktur industri. Struktur ekonomi adalah ciri khas perekonomian suatu negara berdasarkan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian negara tersebut. Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri adalah negara-negara maju (Utami, 2015). Negara dengan struktur ekonomi sektor industri akan memiliki GDP lebih tinggi sehingga penerimaan warga negara akan lebih besar dan penerimaan pajak oleh negara akan lebih besar. Berikut adalah daftar GDP negara-negara G20 pada tahun (Trading Economics, 2020).

Tabel 1. GDP Negara-Negara G20 pada Tahun 2019 (dalam miliar)

| No. | Negara | GDP (USD) |
|-----|-----------------|-----------|
| 1 | Amerika Serikat | 21.428 |
| 2 | China | 14.343 |
| 3 | Uni Eropa | 13.336 |
| 4 | Jepang | 5.082 |
| 5 | Jerman | 3.846 |
| 6 | India | 2.875 |
| 7 | Inggris | 2.827 |
| 8 | Perancis | 2.716 |
| 9 | Italia | 2.001 |
| 10 | Brazil | 1.840 |
| 11 | Kanada | 1.736 |

(dilanjutkan...)

(...lanjutan)

| No. | Negara | GDP (USD) |
|-----|----------------|-----------|
| 12 | Rusia | 1.700 |
| 13 | Korea Selatan | 1.642 |
| 14 | Australia | 1.393 |
| 15 | Meksiko | 1.200 |
| 16 | Indonesia | 1.119 |
| 17 | Arab Saudi | 793 |
| 18 | Turki | 754 |
| 19 | Argentina | 450 |
| 20 | Afrika Selatan | 351 |

Sumber: Data Diolah, 2020

Negara-negara G20 memanfaatkan pajak sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi negara karena penerimaan pajak berdampak besar pada pembangunan suatu negara (Ramadhani, 2020). Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah yang sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi penerimaan (*budgeter*) (Waluyo, 2017). Pajak harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negaranya dan tata cara pemungutan pajak yang berlaku di setiap negara bergantung pada negara masing-masing (Resmi, 2019).

Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak, negara-negara G20 melakukan kerja sama internasional dapat memperkuat transparansi perpajakan global yang akan membuat kesempatan penghindaran pajak semakin kecil (CNN Indonesia, 2019). Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbesar penerimaan pajaknya. Penerimaan pajak merupakan komponen

yang sangat penting dalam pembangunan dan berdampak besar pada perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak negara akan membantu pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Yusnika, 2018).

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala yang menyebabkan penerimaan pajak negara seringkali tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal periode. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target akan berakibat pada kurangnya sumber pendanaan anggaran belanja negara. Hal ini dapat menghambat pembangunan negara dan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dengan cermat hal-hal yang dapat menjadi penghambat atau kendala dalam penerimaan pajak negara.

Salah satu kendala yang menghambat penerimaan pajak negara adalah tingkat inflasi yang dialami oleh suatu negara. Inflasi merupakan keadaan moneter yang sering dijumpai pada semua negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (Natsir, 2014). Akan tetapi, kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut dapat mengakibatkan kenaikan harga pada barang yang lain juga (Bank Indonesia, 2020). Semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara, semakin banyak usaha kecil yang bangkrut, semakin lemahnya daya beli, dan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan (Utami, 2015). Apabila tingkat inflasi meningkat secara terus menerus dan negara tidak dapat menstabilkan harga kembali dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi krisis ekonomi. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat inflasi tidak dapat dikendalikan,

semakin meningkatnya tingkat kemiskinan suatu negara, dan akan berakibat pada penurunan penerimaan pajak negara.

Faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak negara adalah tarif pajak yang diterapkan oleh suatu negara. Tarif pajak adalah tarif yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak setelah memperhitungkan pemotongan (*allowance deductions*). Tarif pajak berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah (Maulida, 2018). Semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh suatu negara, wajib pajak akan semakin enggan untuk melaporkan semua penghasilan kena pajak yang diperolehnya. Akan tetapi, semakin rendah tarif pajak, pembangunan negara akan semakin terhambat. Oleh karena itu, kebijakan tarif pajak yang diterapkan akan sangat memengaruhi penerimaan pajak negara.

Pada penelitian terdahulu mengenai penerimaan pajak yang dilakukan oleh Damayanti, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak, serta tingkat inflasi dan tarif pajak berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak. Richard & Toly (2013) juga mendukung pernyataan bahwa tarif pajak berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, menurut Yusnika (2018) hanya dinyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Richard & Toly (2013) juga menyatakan bahwa tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, Richard & Toly (2013) juga mengatakan bahwa struktur ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.

Pada penelitian ini ditambahkan variabel struktur ekonomi untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak

negara. Struktur ekonomi merupakan komposisi perekonomian negara yang dapat menentukan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Sektor perekonomian yang paling diandalkan atau yang memiliki kontribusi paling besar adalah ciri khas perekonomian suatu negara tersebut (Utami, 2015). Pada penelitian-penelitian terdahulu, hampir tidak ada penelitian tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap penerimaan negara.

Untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan negara-negara yang termasuk dalam G20 dan juga menambahkan variabel struktur ekonomi. Peneliti ingin memberikan kontribusi atas ketidakkonsistenan hasil atas penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil negara-negara G20 karena negara yang termasuk dalam G20 adalah negara-negara yang mewakili 85 persen perekonomian dunia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS VARIABEL YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA G20”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara?
4. Apakah struktur ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak suatu negara.
2. Untuk membuktikan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak suatu negara.
3. Untuk membuktikan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak suatu negara.
4. Untuk membuktikan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak suatu negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah di bidang akuntansi, khususnya mengenai teori optimal pajak yang menjelaskan tentang adanya perbedaan informasi wajib pajak dengan fiskus. Teori optimal pajak membahas tentang pajak yang optimal sehingga pajak yang dibayarkan dapat optimal baik bagi penerimaan negara maupun bagi pembayar pajak. Dengan dasar teori optimal pajak, penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi yang merupakan kendala-kendala ekonomi terhadap penerimaan pajak negara yang belum menemukan hasil yang konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pengungkapan pengaruh tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi terhadap penerimaan pajak untuk peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya pengetahuan yang lebih dalam mengenai tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak negara merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menentukan anggaran belanja negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk pihak-pihak berkepentingan lain.